

RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM KONFLIK INTERNAL DI LIBYA PADA TAHUN 2011-2020

Oleh: Rohayu

(ayuurohayu80@gmail.com)

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Bibliografi: 17 Jurnal, 13 Buku, 20 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia is a tropical country as the fourth biggest chili producer in the world. It suffered from chili supplies in 2015 that required to import that good. There were pros and cons between local chili producers and the consumers. This research described Indonesian small and middle farmers' responses to the policy of chili import from India.

This research is descriptive qualitative. To describe responses from the small and middle local farmers, I did secondary data collection techniques by analyzing document from books, Indonesian official government's reports, journals, publications, websites, and various scientific articles that are relevant to solve the issue. Detailed analysis is supported by nation-state level with perspective of liberalism.

The result showed that chili import from India led to protests from chili farmers since they suffered financially and socially. Indonesian government should have mitigated this situation by protecting them. The lack of officials support has resulted in decreasing number of farmers growing chili and worse import measures.

Key Words: *Import, chili, Indonesian chilli farmers, India*

PENDAHULUAN

Libya terletak di Afrika Utara berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan mengapa populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Toareg, dan Toubou. Konflik di Libya ini di pandang sangat menarik untuk kita ketahui dan pelajari karena konflik yang terjadi pada Libya tidak seperti konflik pada umumnya seperti konflik yang terjadi di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.¹

Dalam konflik Libya, terjadi perang saudara antara kelompok pemberontak *National transitional Council* (NTC) melawan pasukan pemerintahan Libya Muammar Khadafi. Ketika perang berakhir dengan tewasnya Muhammad Khadafi maka kubu *Nasional Transitional Council* (NTC) mengambil alih kekuasaan baru Libya menggantikan pemerintahan Muammar Gaddafi. Namun masalah baru muncul karena pihak-pihak yang menyusun NTC berasal dari beragam golongan dan bisa bersatu karena disatukan oleh sentimen anti Kadafi. Ketika Kadafi selaku musuh

bersama mereka tewas muncul perpecahan dalam tubuh NTC²

Dari waktu yang lalu dan pecahnya konflik tahun 2011 maka pada tahun 2012 Libya akhirnya berhasil mendapatkan pemerintahan yang demokratis usai digelar pemilu parlemen pada bulan juli. Parlemen hasil pemilu tersebut oleh media-media asing dikenal dengan nama *General National Congress* (GNC) atau dalam bahasa Indonesia Kongres Nasional Umum. Keanggotaan GNC didominasi oleh golongan Islamis. Namun, selama GNC memimpin, muncul rasa ketidakpuasan dari militer Libya karena GNC di tuduh lebih memilih mempersenjatai kelompok-kelompok milisi Islamis dari pada memperbarui alutista negara dan meningkatkan kesejahteraan tentara Libya. Rasa tidak suka terhadap gaya kepemimpinan GNC juga muncul dari golongan sekuler karena GNC mencoba menerapkan hukum syariah Islam ke seantero Libya.³

Setelah berjalannya pemerintahan GNC selama 2 tahun seharusnya masa pemerintahan GNC berakhir pada tanggal 7 Februari 2014. Namun dengan alasan belum berhasil merumuskan undang-undang dasar atau konstitusi baru Libya akibat konflik antar golongan di parlemen, GNC lalu memperpanjang masa pemerintahan secara sepihak.

² Subandi, "Kepentingan intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik di Libya tahun 2011:", 2017. Fisipol UMY.

³ Al Jazeera, 2014. "Libyan airspace being 'frequently violated'", Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/libyan-airspace-being-frequently-violated-201411891117715870.html>, (Diakses pada 04 September 2020)

¹ Jerry Indrawan, 'Legalitas Dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) Dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan Di Libya', *Jurnal Kajian Wilayah*, 4.2 (2013), 127–49.

Keputusan tersebut lantas menuai aksi protes dari golongan non-Islamis termasuk Khalifa Haftar selaku salah satu mantan petinggi militer Libya.⁴ Maka pada bulan Mei, Tentara Nasional Libya dibawah pimpinan Khalifa Haftar melakukan pemberontakan bersenjata dengan nama “*Operation Dignity*” (Operasi Martabat) untuk membubarkan GNC supaya pemilu yang baru bisa segera digelar. Respon dari kubu Islamis GNC menganggap tindakan Tentara Nasional Libya adalah upaya kudeta.

Pada bulan Juli 2014, Libya akhirnya mengadakan pemilu dimana kubu sekuler sebagai pemenang dan di bentuklah parlemen baru. Dalam pembentukan parlemen baru tidak disambut dengan baik oleh semua pihak. Kubu Islamis GNC menganggap pemilu yang menjadi dasar pembentukan parlemen baru tidak sah karena pemilu tersebut harusnya tidak digelar jika pasukan pendukung Haftar tidak membubarkan GNC secara paksa. Maka golongan Islamis membentuk parlemen tandingan *New General National Congress* (NGNC). Untuk menggulingkan paksa parlemen baru Libya lewat jalur militer, NGNC lalu menggelar operasi militer tandingan dengan nama “*Operation Dawn*” (Operasi Fajar) dimana kelompok-kelompok milisi Islamis pendukung NGNC menjadi ujung tombak operasi, dari operasi ini akhirnya kubu NGNC mengalami kekalahan.⁵

⁴ Bbc news, 2019. “Khalifa Haftar: The Libyan general with big ambitions”, Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354>, (Diakses pada 04 September 2020)

⁵ Al Monitor, 2014. “Dawn of Libya forces impose control on Tripoli”, Tersedia di: <https://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/libya-tripoli-control-hifter-tribal->

Pada 29 Mei 2018, dalam pertemuan di Paris, dengan ditengahi oleh Pemerintah Perancis dan mendapat dukungan internasional, telah tercapai kesepakatan di antara pemerintah sementara Al-Sarraj dan militer Haftar untuk menggelar pemilu di Libya pada akhir tahun 2019. Namun, friksi tidak dapat diakhiri sampai pertemuan di Italia, pada bulan November tahun 2018. Dalam pertemuan di Abu Dhabi, sebelum jadwal pelaksanaan pemilu disepakati, baik Al-Sarraj maupun Haftar sependapat bahwa demi mengakhiri fase transisional yang *chaotic* diperlukannya pemilu di Libya sebagai jalan untuk menciptakan stabilitas secara menyeluruh. Maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pemilu selanjutnya.

Namun, upaya untuk melakukan pemilu ini terancam akibat tindakan ofensif oleh pasukan tentara Haftar ke Selatan Libya, dengan alasan memberantas ISIS dan pejihaad asing, pada pertengahan Januari 2019. Perdana Menteri Sarraj, orang sipil dan kaya di Libya yang didukung PBB, mengantisipasi langka Jenderal Haftar untuk menguasai Libya, setelah ia melakukan serangan udara yang kian gencar ke Tripoli. Sedangkan pasukan Sarraj berusaha mempertahankan Tripoli, akibat dari konfrontasi kedua belah pihak mengakibatkan korban 32 orang tewas, 62 luka-luka, dan 2.800 penduduk mengungsi.⁶

Salah satu hal yang menjadikan konflik Libya semakin memanas adalah Adanya intervensi negara asing yang mendukung masing-masing kubu yang

⁶ Musthafa Abd Rahman. “Pasukan PM Sarraj Pertahankan Tripoli,” Kompas, 9 April 2019, hal. 5

berperang dalam konflik ini. terdapat 8 negara asing yang mendukung kedua belah pihak dalam konflik internal Libya, pertama Rusia, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Perancis mendukung Kelompok pemberontak Libyan National Army/ Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Marsekal Khalifa Haftar dalam konflik melawan Pemerintahan Persatuan Nasional (GNA) yang merupakan pemerintahan resmi yang didukung oleh Turki, Qatar, Italy dan Uni Eropa.

Mengingat bahwa konflik ini merupakan konflik bersenjata Non-internasional atau pemerintah dan warga negaranya atau biasa disebut dengan konflik internal maka sesuai dengan yang tercantum dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa larangan mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi negara lain. Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara.

Metode dan Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif pluralisme mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi dalam hubungan internasional, hubungan antara negara yang awalnya hanya terbatas pada interaksi aktor negara saja telah mengalami perkembangan dengan adanya aktor-aktor non negara yang ikut berperan aktif didalamnya. Perspektif Pluralisme memandang bahwa dalam suatu tindakan atau kegiatan hubungan internasional tidak hanya negara yang menjadi aktor melainkan terdapat aktor non negara yang

berperan penting dalam suatu kegiatan dalam hubungan internasional tersebut.⁷

Perspektif ini meyakini bahwa aktor non negara merupakan aktor yang penting dalam hubungan internasional. Hal ini berarti negara tidak selalu menjadi aktor utama atau aktor tunggal. Pluralisme mendukung keberagaman aktor non negara yang melihat bahwa setiap keputusan negara yang diambil merupakan hasil dari lobi dari berbagai kepentingan yang mewakili elemen-elemen yang ada di dalamnya.

Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Aktor non negara (non state actors) merupakan salah satu unsur penting dalam dunia politik, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah, MNCs, kelompok, ataupun individu. Menurut kaum pluralis, negara bukanlah aktor tunggal (unitary actor), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Dalam hal ini, negara terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan, dan birokrat lainnya.

Berdasarkan perspektif yang telah penulis paparkan diatas perspektif pluralisme dianggap paling sesuai dengan

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional*. Disiplin dan Metodologi. (Jakarta: LP3S,1990), Hal. 186

penelitian penulis, dimana aktor yang berperan tidak hanya negara saja tetapi terdapat pula organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan resolusi kepada Konflik internal Libya.

Tingkatan analisis adalah sebuah perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional yang didasarkan pada sekumpulan actor atau proses yang sama, yang menyediakan kemungkinan penjelasan yang berhubungan dengan pertanyaan “mengapa”.⁸ Penelitian ini focus pada bagaimana resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam penyelesaian konflik internal di Libya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini menganalisis pada tingkat domestic atau state level. Tingkatan analisis domestik, menurut Goldstein adalah tingkatan analisis yang membahas tentang kumpulan kondisi-kondisi domestic suatu Negara yang mampu mempengaruhi tindakan Negara didalam arena internasional. Pengaruh ini dilihat dari interaksi actor yang dapat terjadi melalui organisasi atau agensi pemerintah, Level domestik mencakup tentang kesatuan individu dengan negara yang mempengaruhi aksi negara dan pemerintah di kancah internasional. Misalnya, konflik etnis, demokrasi, pendapat publik, kampanye pemilu, dll⁹

Teori yang digunakan penulis adalah Resolusi konflik atau dalam bahasa Inggris conflict resolution dalam pandangan Burton adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan

dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Menurut Miall.¹⁰ Resolusi konflik merupakan tindakan mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisa yang memadai dalam sebuah perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas. Sedangkan Askandar menyatakan, resolusi konflik dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun akhirnya dalam mekanisme yang dijalankan ada pihak yang mengalah atau dikalahkan.

Menurut Peter Wallensteen¹¹ definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala segala aksi kekerasan sehingga

⁸Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *International Relations*, ed. 10, (United States of America: Pearson Education, 2014), Hal. 17

⁹ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *International Relations*, ed. 10, (United States of America: Pearson Education, 2014), Hal. 17

¹⁰ Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Hal.5

¹¹ Peter Wallensteen. 2002. Op. Cit. hal:8-9. dalam Aleksius Jemadu. 2008. Op. Cit. hal: 207.

proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan.

Pembahasan

Preventive diplomacy. Preventive Diplomacy merupakan tindakan untuk mencegah timbul dan meluasnya suatu sengketa. Cara ini umumnya dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi regional berkerjasama dengan PBB. Preventive diplomasi lebih kepada mencegah konflik lebih meluas apabila telah terjadi, gerakan diplomasi preventif ini dilakukan dengan cara melakukan mediasi sementara antara dua belah pihak secara langsung untuk mencari jalan keluar sementara agar konflik yang terjadi tidak meluas.

Instrumen yang di kembangkan untuk meningkatkan dampak diplomasi preventif, khususnya di Libya. Di mana Utusan Khusus bekerja untuk mencapai resolusi politik dari konflik tersebut sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 1970 (2011) dan 1973 (2011) dan untuk mencegah penderitaan kemanusiaan lebih lanjut seperti pendanaan yang dapat disebarkan dengan cepat dan keahlian teknis, juga menguntungkan utusan yang bekerja untuk menyelesaikan konflik saat ini.¹² Preventive diplomasi lebih kepada mencegah konflik lebih meluas apabila telah terjadi, gerakan diplomasi preventif ini dilakukan dengan cara melakukan mediasi sementara antara dua belah pihak secara langsung untuk mencari jalan

keluar sementara agar konflik yang terjadi tidak meluas.

Sekretariat PBB melakukan upaya selanjutnya untuk membawa AU ke dalam diskusi Grup Kontak di Libya dan berkonsultasi dengan Utusan Khusus PBB AI Khatib, tetapi penolakan implementasi 1973 oleh para pemimpin Afrika atas pada pertemuan bersama antara Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan PSC di Addis pada bulan Juni 2012 menunjukkan rasa frustrasi mereka. Karena lebih dari separuh agenda Dewan Keamanan terkait dengan krisis Libya dan melibatkan beberapa bentuk intervensi dalam urusan internal, penjaga perdamaian, pembangunan perdamaian, atau jasa baik, sangat penting untuk mengurangi dampak warisan sejarah pada koordinasi antara PBB dan organisasi regional. dengan berbagi analisis secara terus menerus dan menentukan tujuan kebijakan bersama untuk situasi tertentu.¹³

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan (DK) harus makin mengemuka. Demikian benang merah pertemuan organisasi-organisasi internasional dan regional yang difasilitasi Liga Arab (LA) di Kairo, Mesir. Intinya adalah penegakan kembali resolusi DK nomor 1973 untuk melindungi warga sipil dalam konflik Libya tersebut.¹⁴ Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi, atau

¹² Report Of The Secretary-General. Preventive Diplomacy: Delivering Results. 2012.
<https://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/SG%20Report%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf>. (diakses 2 Februari 2021)

¹³ <https://www.crisisgroup.org/africa/preventive-diplomacy-africa-adapting-new-realities> (diakses 19 Februari 2021)

¹⁴ Kompas, 2011. "PBB Berperan Penting di Libya", Tersedia di:
<https://internasional.kompas.com/read/2011/06/19/05412171/PBB.berperan.Penting.di.Libya>. (diakses 23 Oktober 2020)

pelanggaran lain terhadap perdamaian, dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional terlebih dalam konflik internal Libya.

Dewan Keamanan PBB merupakan Organisasi Internasional yang berdiri sejak tahun 1945, menjadi ujung tombak bagi dunia internasional agar dapat menyelesaikan dan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Dewan Keamanan PBB dianggap berhak melakukan intervensi kepada negara-negara yang berkonflik, dikarenakan Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*) untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta dan asumsi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa konflik Libya merupakan konflik internal yang bermula dari ketidakpuasan kelompok pemberontak terhadap pemerintahan, sehingga menghasilkan usaha kudeta terhadap pemimpin resmi. Pemberontakan dan Kudeta tersebut memunculkan konflik-konflik baru di Libya. Adanya intervensi dari pihak asing sehingga PBB telah banyak melakukan langkah mediasi, melalui konferensi yang mana pada tahun 2020 ini menghasilkan kesepakatan pada Dewan Keamanan PBB tentang Resolusi 2510 (2020) Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuan ke 8722, pada 12 Februari 2020 pada point kesepuluh mengingat kembali komitmen yang dibuat di Berlin untuk mematuhi embargo senjata dan menuntut

kepatuhan penuh termasuk oleh semua Negara Anggota dengan embargo senjata yang diberlakukan berdasarkan resolusi 1970 (2011) sebagaimana diubah oleh resolusi berikutnya, termasuk dengan menghentikan semua dukungan untuk dan menarik semua personel tentara bayaran bersenjata, dan menuntut semua Negara Anggota untuk tidak campur tangan dalam konflik atau mengambil tindakan yang memperburuk konflik.

Preventive diplomacy pada konflik Libya memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan; membuat satu peringatan dini dengan pengumpulan informasi dan misi pencari fakta baik resmi maupun tidak resmi; di samping juga harus melibatkan penempatan pasukan preventif; dan dalam keadaan tertentu menetapkan wilayah bebas militer (Suryokusumo, 2004: 148). Diharapkan dengan langkah ini rakyat Libya dapat menikmati kehidupannya tanpa dibayang-bayangi dengan serangan-serangan bom yang mengakibatkan banyak korban yang bertentangan dengan HAM.

Peace keeping. Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB dan juga personel sipil membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara-cara damai.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Libya sebagai upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Tindakan pertama dalam penyelesaian konflik Libya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1970 yang berisikan tentang pengajuan penyelesaian konflik kepada mahkamah

¹⁵ United Nations Department of Public Information. 2011. *Basic Facts About the United Nations*. New York. United Nations Publication. hal. 75.

pidana internasional sekaligus pemberian sanksi ekonomi kepada Libya. Tindakan kedua dalam penyelesaian konflik Libya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1973 sebagai sanksi ekonomi dan juga keputusan untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil.¹⁶ Keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Libya merupakan hal yang legal. Hal ini dikarenakan konflik Libya dikategorikan sebagai situasi yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional karena dapat berdampak pada keikutsertaan berbagai negara dan konflik ini dipandang akan meluas hingga keluar negara Libya sendiri.

Disisi yang sama dukungan dari PBB kepada Libya telah banyak dilakukan seperti menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di beberapa negara, dan juga membentuk *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL) Misi PBB untuk Libya adalah misi politik khusus terintegrasi yang didirikan pada 16 September 2011 oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2009 (2011) atas permintaan otoritas Libya untuk mendukung otoritas transisi baru negara tersebut dalam upaya pasca-konflik Libya.

Mandat UNSMIL Mandatnya saat ini ditetapkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2486 (2019) terbaru, yang memperpanjang misi UNSMIL hingga 15 September 2020.¹⁷ Kemudian

membentuk Divisi Urusan Politik (PAD) untuk mendukung dan mengadakan dialog politik nasional multi-jalur tunggal, inklusif dan transparan untuk mencapai kesepakatan politik yang komprehensif yang bertujuan untuk mengakhiri konflik politik dan militer dan kelembagaan.¹⁸ Adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa selama terjadinya konflik internal Libya antara lain, melakukan konferensi bersama anggota UNSMIL, Dewan Keamanan PBB dan organisasi lainnya untuk membuat resolusi terhadap konflik internal Libya.

Tekanan kuat dari PBB untuk menyelesaikan krisis Libya telah membangkitkan optimisme, tetapi ini memudar dengan serangan dari pasukan Jenderal Haftar, yang didukung oleh Rusia. Turki dan Qatar mendukung GNA secara militer dengan hampir 20.000 pasukan penjaga perdamaian, yang diawali dengan pertemuan antara Fayez al Sarraj dan Erdogan yang bertujuan untuk Turki dan GNA menandatangani perjanjian tentang batas maritim di Laut Mediterania serta kesepakatan tentang peningkatan kerja sama keamanan dan militer, dan Erdogan mengumumkan bahwa dia akan mengirim pasukan ke Libya, baik melalui jalur penjaga keamanan PBB maupun secara langsung serta menambahkan bahwa GNA meminta bantuan Turki dalam perangnya melawan LNA. Sebelumnya, Turki telah membatasi dukungannya untuk memasok peralatan militer, termasuk tank dan

¹⁶ Lisa Karismawatie, 2012. "Peran Keamanan Dewan PBB dalam Penyelesaian Konflik Libya sebagai pelaksanaan fungsi pemerliharan perdamaian dan keamanan Iternasional", Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal.

¹⁷ UNSMIL, "United Nations Support Mission in Libya", Tersedia di

<https://unsmil.unmissions.org/political-affairs-division> (diakses 25 Oktober 2020)

¹⁸ UNSMIL Tersedia di <https://unsmil.unmissions.org/political-affairs-division>. (diakses 25 Oktober 2020)

drone tetapi karena telah di setujuiannya perjanjian mengenai kerjasama, keamanan dan militer sehingga Turki setuju untuk memberikan bantuannya.¹⁹ Pasukan dari Negara lainnya yang dikerahkan ke perbatasan antar negara Libya yang mana termasuk mesir yang menjaga perbatasan antara Libya dan negara Mesir, Algeria, Tunisia dan Sudan, baik di laut dan darat khususnya di tempatkan pada perbatasan antara daerah GNA Tripoli dengan daerah kekuasaan LNA.²⁰

Pemberian bantuan melalui tentara penjaga kedamaian ialah hal ini dilakukan karena dukungan militer eksternal yang tidak termasuk pada anggota PBB kepada Libya yang memiliki kepentingan tersebut meningkatkan risiko konflik regional, dan pihak PBB lebih memfokuskan pada penyelesaian secara politik.

Aksi secara politik yang di maksud ialah seperti Gencatan senjata termasuk embargo senjata, tetapi perjanjian ini telah di langgar oleh pasukan Ahftar, sehingga pertemuan komite militer gabungan - komite 5 + 5 - di Jenewa yang akan membahas gencatan senjata ke gencatan senjata, UNSMIL mulai mengerjakan Komisi Militer Gabungan 5 + 5 bagian dari keamanan yang akan membuka jalan bagi dialog yang akan mengirimkan lebih banyak tentara penjaga keamanan dan perdamaian ke Libya. Kemudian advokasi atau bantuan hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk koordinasi dan kerja sama

yang lebih baik dengan Uni Afrika untuk mengatasi situasi di Libya.²¹

Peace building. Peace Building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur –struktur yang dan guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace Building* lahir setelah berlangsungnya konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan diantara mereka. Hal demikian tidak hanya memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.

PBB melalui ([Political and Peacebuilding Affairs](#)) DPPA melakukan upaya perdamaian PBB, memantau perkembangan politik global dan menasihati Sekretaris Jenderal tentang pencegahan dan pengelolaan krisis, termasuk melalui penggunaan "jasa baik" dengan keikut srtaan pihak ketiga sebagai upaya diplomatiknya untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan perselisihan secara damai. Departemen ini memberikan dukungan kepada banyak utusan Sekretaris Jenderal yang terlibat dalam pembicaraan damai atau diplomasi krisis, sambil mengawasi "misi politik" Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbasis lapangan dengan mandat untuk membantu negara dan wilayah menyelesaikan konflik dan ketegangan secara damai.²²

¹⁹ <https://alarabiya.net/features/2020/07/13/Libya-crisis-timeline-The-battle-for-Tripoli-Sirte> (diakses 5 Februari)

²⁰ <https://www.theafricareport.com/23047/there-is-no-military-solution-to-the-conflict-in-libya-un-sec-gen-antonio-guterres/> (diakses 5 Februari)

²¹ <https://www.theafricareport.com/23047/there-is-no-military-solution-to-the-conflict-in-libya-un-sec-gen-antonio-guterres/> (diakses 5 Februari)

²² <https://dppa.un.org/en/prevention-and-mediation> (diakses 7 Februari)

Melalui DPPA di Libya, di mana para pihak telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di berbagai waktu di masa lalu, konflik telah meningkat. Seruan gencatan senjata di Libya menjadi keuntungan nyata di lapangan. Tindakan PBB melalui DPPA secara politik yang akan mengikut sertakan yang berkonflik, memastikan pemerintahan demokratis yang inklusif dan efektif dengan mengadvokasi, menasihati, mengembangkan ruang dialog yang tidak memihak, mencapai konsensus, dan membangun lembaga. Di tengah ketidakstabilan politik dan situasi kemanusiaan yang memburuk, UNDP bersama DPPA berkomitmen untuk mendukung transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Libya. Dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil Libya, warga negara termasuk perempuan dan pemuda, pembuat keputusan dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan warga negara dapat secara aktif dan efektif berpartisipasi dalam transisi demokrasi di negara mereka.²³

Tujuan dari DPPA dan UNDP dan juga UNSMIL serta disivi lain yang bertugas bersama Misi untuk Libya ialah untuk memastikan partisipasi aktif warga Libya dalam transisi demokrasi Libya dan bahwa negara tersebut mengelola transisinya menjadi negara yang didirikan berdasarkan aturan hukum. Dengan mendukung otoritas pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penyampaian layanan publik yang lebih baik kepada warga; dan bahwa proses rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional diperkuat agar menjadi seinklusif mungkin. Agar pemerintahan demokratis

dan proses pembangunan perdamaian benar-benar berhasil, DPPA dan UNDP juga menjaga perempuan harus memainkan peran sentral. UNDP mendukung partisipasi penuh perempuan dalam transisi yang sedang berlangsung dan bahwa hak-hak perempuan diintegrasikan dalam kebijakan dan peraturan transisi. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan Advokasi yang berkelanjutan oleh kelompok wanita telah menghasilkan pembentukan Unit Pemberdayaan dan Dukungan Wanita di Kantor Perdana Menteri. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan memastikan kesetaraan gender tercermin dalam hasil dialog politik.²⁴

Peran UNSMIL di Libya Pasca Revolusi (Gerhard Marpaung) akhir dari perjuangan rakyat Libya untuk mencapai demokrasi, melainkan ia hanya merupakan pintu masuk menuju demokrasi yang sesungguhnya. Dalam studi ilmu hubungan internasional, situasi ini merupakan titik yang sangat rentan bagi sebuah negara. Moammar Khadafy meninggalkan negara yang kosong bagi para oposisi, dengan kondisi state building without institutional infrastructure. Dimana Libya tidak memiliki sama sekali partai oposisi dan tidak memiliki lembaga kontrol pemerintahan. Dalam kasus ini, sebagai pihak ketiga yang masuk ke dalam konflik Libya, PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk suatu organisasi yang ditugaskan membantu pemulihan keadaan di Libya pasca

24

<https://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/projects/Toward-National-Reconciliation-in-Libya.html> (diakses 7 Februari)

²³ <https://dppa.un.org/en/search/node/libya-peacebuilding> (diakses 7 Februari)

revolusi yang diberi nama United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL). UNSMIL yang dibentuk pada 16 September 2011 dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2009 (2011) atas permintaan pihak berwenang Libya setelah 6 bulan konflik bersenjata, yang ditujukan untuk memulihkan keadaan di Libya pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafy. Tulisan berikut berujuan untuk menjelaskan tentang peran United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) dalam menciptakan stabilitas politik di Libya pasca revolusi. Kerangka Dasar Teori 1. Teori Stabilitas Politik Stabilitas politik dapat dipahami sebagai kondisi dimana tidak ada timbulnya perubahan mendasar atau perubahan yang revolusioner dalam sistem politik (pemerintah), atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan. Secara teoritis stabilitas politik ditentukan oleh tiga variabel yang saling berkaitan, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan-pelembagaan baik struktur maupun proses politik dan partisipasi politik. Perkembangan ekonomi meliputi adanya tingkat pertumbuhan yang cukup dalam masyarakat. Sedangkan pelembagaan politik mengarah pada pengertian tidak timbulnya konflik antara kekuatan-kekuatan politik. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan stabilitas politik adalah pola sikap dan tingkah laku segenap komponen sistem politik yang membangun kelestarian susunan struktur dan hubungan kekuasaan sehingga menjamin efektifitas pemerintahan.²⁵

Dalam konsep tersebut, bentuk atau teknik partisipasi politik dari aktor-aktor yang ada yang membentuk sesuatu

yang saling berhubungan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga. Aktor-aktor tersebut dapat saling berkaitan karena memiliki pengaruh yang besar di dalam pemulihan stabilitas di Libya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mengatur dan mengakomodir jalannya sistem yang baru terbentuk pasca jatuhnya rezim yang lama. Masyarakatpun memiliki peran yang sangat besar dan penting, karena suatu sistem pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses sistem yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan pihak ketiga dalam kasus tersebut adalah UNSMIL, lembaga yang dibentuk oleh PBB yang bertujuan untuk memandu jalannya proses dan sistem yang baru berjalan di Libya tersebut. 3 3 UNSMIL adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh PBB dalam menciptakan stabilitas politik di Libya, dimana pada saat itu Libya dalam kondisi tanpa pemerintahan akibat revolusi yg terjadi di Libya.²⁶

Kesimpulan

Konflik internal di Libya disebabkan oleh kondisi keamanan negara tersebut lemah dan cenderung tidak kondusif akibat tidak adanya lembaga keamanan pada masa transisi setelah revolusi sehingga terjadi dilema keamanan adanya persaingan politik kekuasaan oleh beberapa kelompok yang ingin mewujudkan kepentingannya kelompoknya di Libya, kelompok tersebut adalah kubu islamis yang berada dalam General National Congress (GNC) dan kubu militer kelompok Khalifa Haftar. Kelompok Islamis di GNC ingin membentuk pemerintahan di Libya

²⁵ <https://unsmil.unmissions.org/political-affairs-division>

²⁶ <https://unsmil.unmissions.org/mandate>

berdasarkan hukum syariah islam, namun mendapat pertentangan dari kubu militer Khalifa Haftar kemudian kondisi perekonomian Libya di sektor minyak sedang lumpuh pasca revolusi ditambah lagi dengan masalah banyaknya pengangguran di Libya.

Keterlibatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Konflik Internal di Libya ialah melalui kongres yang dilaksanakan PBB menyatakan pengakuannya terhadap NTC sebagai pemerintahan Libya yang sah. PBB juga mendorong agar segera dilakukan pemilihan umum di Libya. Dukungan transisi demokrasi di Libya tidak hanya datang dari dalam negeri Libya, tetapi juga pihak luar. Dukungan dari pihak luar ditunjukkan oleh PBB yang mendukung agar segera dilakukan transisi demokrasi Libya. Perwakilan PBB yaitu Misi untuk Libya (UNSMIL) mendukung dan ikut menyelenggarakan proses pencalonan untuk pemilihan majelis perumus konstitusi dengan perlunya dialog nasional yang inklusif.

Kemudian pada tahun 2017 badan bantuan makanan darurat PBB telah mengirimkan cukup makanan untuk memberi makan sekitar 1.500 orang yang paling terkena dampak pertempuran. Ini memberikan bantuan makanan kepada hampir 300 keluarga, dengan masing-masing jatah menawarkan persediaan beras, pasta, tepung terigu, buncis, minyak sayur, gula, dan pasta tomat untuk satu keluarga, selanjutnya keterlibatan PBB mengadakan dua sesi Komite Perancangan Bersama, yang terdiri dari anggota DPR dan Dewan Tinggi Negara, untuk menyetujui serangkaian amandemen Perjanjian Politik Libya.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk

upaya untuk mengekspor minyak mentah secara ilegal dari Libya dan menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat dalam upaya tersebut dan Resolusi tersebut meminta Libya mengawasi embargo senjata, larangan perjalanan, dan pembekuan aset yang diberlakukan di negara itu berdasarkan resolusi 1970. Ini termasuk tindakan oleh Negara Anggota untuk melarang kapal memasuki pelabuhan dan mewajibkan warga negara mereka untuk tidak terlibat dalam transaksi keuangan apa pun sehubungan dengan minyak mentah dari Libya di atas kapal yang ditunjuk oleh komite.

Upaya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam penyelesaian Konflik internal di Libya yang pertama dengan preventive diplomacy merupakan tindakan untuk mencegah timbul dan meluasnya suatu sengketa. Adapun beberapa resolusi yang dibuat oleh dewan keamanan PBB semenjak bergulirnya konflik internal antara lain Dewan Keamanan 1970 (2011) dan 1973 (2011) dan untuk mencegah penderitaan kemanusiaan lebih lanjut seperti pendanaan yang dapat disebarkan dengan cepat dan keahlian teknis, juga menguntungkan utusan yang bekerja untuk menyelesaikan konflik saat ini, kemudian Resolusi 2174 (2014), Resolusi 2259 (2015) Perjanjian Politik untuk Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) sebagai satu-satunya pemerintah Libya yang sah yang dibentuk untuk memelihara pemerintahan, meningkatkan stabilitas dan pembangunan ekonomi, Resolusi 2298 (2016) penghancuran senjata kimia kategori 2 Libya yang tersisa secara cepat, serta Resolusi 2441 (2018) Pencegahan Ekspor Minyak Mentah, pelaksanaan otorisasi embargo senjata, larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Libya (UNSMIL) telah menentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB ke negara yang dilanda perang itu, dengan mengatakan bahwa "tidak ada penerimaan untuk pasukan asing di Libya dan Peace Building melalui ([Political and Peacebuilding Affairs](#)) DPPA melakukan upaya perdamaian PBB, melalui penggunaan "jasa baik" diplomatiknya untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan perselisihan secara damai menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di berbagai Tindakan PBB melalui DPPA secara politik yang akan mengikut sertakan yang berkonflik, memastikan pemerintahan demokratis yang inklusif dan efektif dengan mengadvokasi, menasihati, mengembangkan ruang dialog yang tidak memihak, mencapai konsensus, dan membangun lembaga.

Sehingga dari hasil pengumpulan data serta analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyelesaian konflik internal Libya pihak PBB melalui Dewan Keamanan PBB, UNSMIL, DPPA, UNDP melakukan pendekatan politik sebagai langkah intervensi kepada perbaikan kondisi Libya, beberapa resolusi penting yang di susun oleh PBB melalui pertemuan-pertemuan, konferensi serta dialog baik di dalam maupun di luar Libya, kesemua resolusi yang di rancang dan di tetapkan oleh Dewan Keamanan PBB ialah sebagai langkah untuk membentuk pemerintahan Libya yang lebih sah dan Stabil baik dari segi politik, ekonomi dan sosial, banyak langkah-langkah yang di tetapkan dalam

resolusi DK PBB seperti embargo senjata, stabilitas ekonomi, keamanan dan kenteraman, isu HAM dan Stabilisasi pemerintahan Libya.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Ahmad Sahide. The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya, Vo.4 No.2, (Oktober 2015)
- Danial, Peranan Dewan Keamanan PBB dalam proses penyelesaian konflik internasional, jurnal imu dan budaya, UNTIRTA, Banten, 2012, hlm. 2336
- Indrawan, Jerry, 'Legalitas Dan Motivasi NATO Legalitas Dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) Dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan Di Libya', Jurnal Kajian Wilayah, 4.2 (2013),
- K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy"(International Studies Quarterly, Vol 14, No. 3, 1970),
- Keohane dan Young. Terdapat dalam Citra Hennida. 2015. *Rezim & Organisasi Internasional*. Malang: Intrans Publishing. Hal. 7-8.
- Mevy Eka Nurhalizah, 'Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel Pada Masa Kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan Tahun 2014-2018', 4.April (2019),
- Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction(New York: Palgrave MacMillan, 2007),
- Nainggolan, Poltak Partogi, 'PERANG SAUDARA SERTA PROSPEK LIBYA DAN " THE ARAB SPRING "

Buku

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha. Ilmu,
- Clive Archer, 2001. *International Organizations*; Third Edition, Routledge, New York,
- David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, Vol. 14, No. 1 (1961),
- Finnemore. 1999. Terdapat dalam Citra Hennida. Op.Cit. Hal.
- Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* 4th edition, (New York: Alfred A. Knopf, 196),
- Hans J. Morgenthau. 1949. *Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace*. New York. Alfred A Knoff,
- Hans. J Morgenthau, "Another Great Debate. *The National Interest of the United States*," (The American Political Science Review XLVI, 1952), Hal. 972
- Holsti, K.J. 2008. *International Politics, A Framework for Analysis*. USA: Prentice Hall International,
- Huala Adolf, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.
- Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *International Relations*. 10, (United States of America: Pearson Education, 2014),
- Jhon T. Raourke, *International Politics on The World stage*, (USA: University of Connecticut, 2001),

- Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,
- Mauna Boer. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumnus.

Meiser, 2011. *United Nations a Story*. Atlantic Monthly Press

Miall, D. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.

Musthafa Abd Rahman. "Pasukan PM Sarraj Pertahankan Tripoli," *Kompas*, 9 April 2019,

Website

- Al Jazeera, 2014. "Libyan airspace being 'frequently violated'", Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/libyan-airspace-being-frequently-violated-201411891117715870.html>, (Diakses pada 04 September 2020)
- Al Monitor, 2014. "Dawn of Libya forces impose control on Tripoli", Tersedia di: <https://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/08/libya-tripoli-control-hifter-tribal-forces.html#ixzz6XGy67pTB>, (Diakses pada 05 September 2020)
- Al Jazeera, 2015. "Libyan parliament confirms Haftar as army chief", Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/africa/2015/03/libya-khalifa-haftar-army-chief-150302214813223.html>, (Diakses pada 06 September 2020)
- Bbc news, 2019. "Khalifa Haftar: The Libyan general with big ambitions", Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354>, (Diakses pada 04 September 2020)
- Brian Katz, 2020. "Moscow's Next Front: Russia's Expanding Military Footprint in Libya", [csis.org](https://www.csis.org/analysis/moscow-s-next-front-russia-s-expanding-military-footprint-libya).

- Tersedia di:
<https://www.csis.org/analysis/moscow-next-front-russias-expanding-military-footprint-libya>, (Diakses pada 06 September 2020)
<https://unsmil.unmissions.org/mandate>
<https://unsmil.unmissions.org/political-affairs-division>”
- Jon NMB. Alterman, 2020. “The Internationalization of Libya”, csis.org.Tersedia di:
<https://www.csis.org/podcasts/babel-translating-middle-east/internationalization-libya>, (Diakses pada 06 September 2020)
- Tarek Megerisi, 2020. “Geostrategic Dimensions of Libya’s Civil War”, tersedia di:
<https://africacenter.org/publication/geostrategic-dimensions-libya-civil-war/>, (Diakses pada 05 September 2020)
- PBB.Berperan.Penting.di.Libya.<https://internasional.kompas.com/read/2011/06/19/05412171/> (diakses pada 23 Oktober 2020)
- VOAIndonesia, 2017. “Lebih 140 Tewas Akibat Serangan di Pangkalan Udara Libya”, Tersedia di:<https://www.voaindonesia.com/article/lebih-140-tewas-akibat-serangan-di-pangkalan-udara-libya/3863250.html>, (Diakses pada 04 September 2020)
- United Nations Department of Public Information. 2011. *Basic Facts About the United Nations*. New York. United Nations Publication. hal. 75.